

BAB 3

RASIONALITAS KOREA SELATAN DALAM PEMBERLANJUTAN NEGOSIASI IK-CEPA

3.1 *External Change* yang Mempengaruhi Korea Selatan dalam Pemberlanjutan Negosiasi IK-CEPA: Perang Dagang Amerika Serikat dan China

Faktor *external change* merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan suatu negara yang berasal dari luar negara tersebut yang dapat secara langsung mempengaruhi negara tersebut pada sektor manapun yang menyebabkan negara tersebut mengeluarkan kebijakan tertentu agar dapat beradaptasi terhadap faktor - faktor eksternal tersebut. Menurut model adaptif James Rosenau, faktor ini memiliki 3 variabel utama yang dapat mempengaruhi suatu negara dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya, yaitu *great power structure*, aliansi, dan yang terakhir adalah *situational factor*. Terkait dengan kerjasama IK-CEPA dan juga rasionalitas dari Korea Selatan terkait dengan pemberlanjutan negosiasinya, penulis menemukan bahwa terdapat 1 yang berpengaruh yang mendorong Korea Selatan agar melanjutkan proses negosiasi kerjasama IK-CEPA yang sempat terhenti pada tahun 2014 ini.

Pada penelitian ini, faktor yang mempengaruhi Korea Selatan untuk melanjutkan negosiasi Kerjasama IK-CEPA ini dapat dianalisa melalui salah satu variabel pada *external change* yaitu *situational factor*. *Situational factor* merujuk

kepada sebuah situasi seperti ancaman dan krisis yang mengancam ataupun isu internasional yang terjadi pada ranah external negara sehingga mendorong negara tersebut untuk melakukan adaptasi dan perubahan. Di penelitian ini, *situational factor* yang terjadi adalah perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga China. Hubungan antara Amerika Serikat dan juga China memang selalu berada di ambang ketegangan yang dapat sewaktu – waktu jika terjadi konflik pada sektor manapun mengganggu kestabilan *status quo* dunia internasional. Perang dagang ini bukan pengecualian karena dengan adanya konflik ini, keadaan perekonomian internasional menjadi tidak stabil dan mempengaruhi perekonomian dari negara – negara di seluruh dunia. Perang dagang yang diawali oleh administrasi trump ini sejatinya ditujukan untuk membalikkan efek defisit perdagangan dengan China, akan tetapi hal tersebut berujung kepada memburuknya hubungan antara Amerika Serikat dan juga China sehingga menyebabkan ketegangan yang berujung kepada konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan juga China.¹ Sebagai 2 polar perekonomian dunia, konflik perang dagang ini mengganggu kestabilan perekonomian dunia dan juga memberikan dampak negatif kepada negara - negara di dunia.

Korea Selatan tentunya tidak lepas dari dampak negatif ini dan bahkan merupakan salah satu negara yang akan menerima dampak paling besar akibat dari adanya konflik perang dagang antara dua negara adidaya ini, melihat Korea Selatan merupakan salah satu negara ataupun bahkan satu – satunya negara di dunia dengan hubungan yang sangat kompleks terhadap kedua negara yang

¹ Sitorus, D. S. (2021). Perang Dagang Amerika Serikat Dan Tiongkok: Bagaimana Dampaknya Bagi perekonomian Indonesia Tahun 2017 - 2020? *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 13(1), 187. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v13i1.34192>

sedang berkonflik ini. Korea Selatan memiliki hubungan bilateral yang sangat kritikal dengan Amerika Serikat, dan juga Korea Selatan memiliki sejarah dan keterkaitan yang panjang dengan China sehingga dengan terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat ini memaksa Korea Selatan untuk berada di posisi yang sangat dilema untuk memilih pihak mana.²

Dilema tersebut muncul akibat dari Amerika Serikat dan juga China yang merupakan negara tujuan export Korea Selatan terbesar pertama dan kedua sehingga jika kedua negara mengalami sebuah konflik tentu akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi aktivitas ekspor dan juga perekonomian negara Korea Selatan itu sendiri. Konflik antara AS dan China ini pada akhirnya akan menghasilkan kenaikan tarif baik impor dan ekspor kedua negara dan hal ini akan memberikan dampak terhadap jumlah aktivitas perdagangan antara kedua negara tersebut. Dengan semakin tingginya harga tarif, maka aktivitas perdagangan akan semakin berkurang dan secara tidak langsung akan memberikan dampak negatif kepada Korea Selatan yang memiliki keterkaitan tinggi dengan kedua negara tersebut. Dengan dinaikkannya tarif pajak oleh Amerika Serikat terhadap produk - produk dari China menyebabkan menurunnya demand dari Amerika Serikat terhadap produk dari China tersebut.³ Hal tersebut tentunya secara langsung menyebabkan menurunnya demand dari China terhadap *intermediate goods* dari Korea Selatan sehingga dapat menjadi ancaman nyata

² Nam, E.-Y., & Kim, S.-T. (2020). The US-china trade war and the Korean economy's risk mitigating strategies. *Korea International Trade Research Institute*, 16(1), 113–129. <https://doi.org/10.16980/jitc.16.1.202002.113>

³ Sari, M., Marselina, & Aida, N. (2021). Perang Dagang AS-Cina : Dampak Ekonomi Pada Negara Mitra Dagang AS-Cina. *EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 21(2), 132–144. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7518>

yang dapat semakin memperburuk keadaan bagi Korea Selatan dan juga perekonomian negaranya.

Sejatinya dampak negatif yang dapat diterima oleh Korea Selatan dapat dianalisis menjadi 2 bagian, yaitu dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang bagi perekonomian Korea Selatan. Pada dampak jangka pendek, tentunya ancaman terhadap penurunan dan mengecilnya aktivitas ekspor terhadap China maupun juga Amerika Serikat. Seperti yang telah dijelaskan bahwa perekonomian Korea Selatan merupakan mekanisme yang sangat erat berkaitan dengan aktivitas ekspor terhadap kedua negara tersebut. Ditambah juga perekonomian Korea Selatan ini sangat rentan terhadap perubahan signifikan secara eksternal.⁴ KIEP menganalisa bahwa dengan adanya konflik dagang antara AS dan China ini, Korea Selatan akan mengalami penurunan nilai ekspor yang cukup besar. *Korean Institute for International Economic Policy* atau KIEP merupakan sebuah institusi yang berdedikasi untuk menganalisa dan membantu memberikan masukan terhadap negosiasi perdagangan Korea Selatan dan melalui analisisnya, KIEP mengemukakan bahwa Korea Selatan akan mengalami penurunan nilai ekspor sebesar \$5.2 Miliar USD dikarenakan oleh persentase aktivitas ekspor yang dimiliki oleh kedua negara tersebut yang mencapai 38,9% dimana 26,8% nya terhadap China dan 12,1% sisanya terhadap Amerika Serikat.⁵

⁴Nam, E.-Y., & Kim, S.-T. (2020). The US-china trade war and the Korean economy's risk mitigating strategies. *Korea International Trade Research Institute*, 16(1), 113–129. <https://doi.org/10.16980/jitc.16.1.202002.113>

⁵ Jeong, S. (2019). The impact of US-China Trade War on south Korea's economy. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(9). <https://doi.org/10.24940/theijhss/2019/v7/i9/hs1909-015>

Hal ini diperkuat dengan dilema yang dialami oleh perusahaan – perusahaan Korea Selatan yang berada di era kebingungan dikarenakan oleh tekanan yang diberikan baik oleh AS maupun juga China. Sebagai bentuk tekanan dari AS, Pemerintahan Presiden Trump menyuarakan kepada perusahaan – perusahaan berbasis teknologi besar di dunia untuk menahan pasokan suku cadang kepada perusahaan – perusahaan China. Akan tetapi China mengeluarkan serangan balasan dengan memanggil perusahaan – perusahaan seperti Dell, Microsoft, dan juga beberapa perusahaan dari Korea Selatan seperti SK Hynix yang merupakan sebuah perusahaan produsen semikonduktor dan juga Samsung Electronics. China mengancam bahwa jika para perusahaan teknologi tersebut mengikuti perintah Presiden Trump untuk menahan pemasokan suku cadang ke China, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi yang serius dari China seperti di blacklist pada pasar domestik China dan bahkan dapat diberikan sanksi berat.⁶ Tentunya bagi perusahaan Korea Selatan seperti Samsung Electronics, SK Hynix, dan juga perusahaan – perusahaan lain yang memberikan supply suku cadang kepada perusahaan – perusahaan China seperti Huawei akan memberikan dampak yang sangat negatif seperti kehilangan salah satu pasar utama dan kerugian ekonomi yang sangat buruk terutama pada masa perkembangan perekonomian Korea Selatan yang bisa dibilang sedang berada di masa terpuruk ini.

Pada sektor lain, terdapat faktor lain yang juga menjadi tekanan bagi Korea Selatan yaitu ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Meskipun Korea Selatan

⁶ Bark, T. (2022). Korea's recent trade performance in response to external development. https://keia.org/wp-content/uploads/2022/02/KEI_Koreas-Economy_2022_Bark.pdf

sejatinya bergantung kepada China terkait dengan perekonomiannya, bukan pada sektor keamanan nasional yang dimana Korea Selatan bergantung kepada Amerika Serikat terkait hal tersebut akan tetapi melihat China yang memiliki hubungan yang erat dengan Korea Utara dan merupakan satu – satunya negara yang bisa dibilang sebagai sekutu satu satunya dari Korea Utara. Dengan hancurnya hubungan antara China dan Korea Selatan, maka hal ini akan menjadi kesempatan bagi Korea Utara untuk semakin mempererat hubungannya dengan China dan muncul lagi sebagai ancaman di kawasan bagi Korea Selatan sehingga dengan hancurnya hubungan dengan China ini tentunya tidak hanya akan memberikan ancaman kepada sektor perekonomian Korea Selatan saja, akan tetapi juga memunculkan ancaman baru yang dapat mengancam keamanan nasional dari Korea Selatan yang muncul dari Korea Utara.⁷ Beberapa hal diatas menjadi faktor penting dalam perhitungan Korea Selatan untuk berpihak kepada China dalam konflik perang dagang ini.

Kemudian terdapat juga faktor ketidakpastian yang muncul akibat perubahan - perubahan tarif yang muncul akibat adanya konflik perang dagang ini. Dengan adanya ketidakpastian ini menyebabkan kebingungan yang muncul pada perusahaan - perusahaan Korea terutama yang terletak di China sehingga mengancam pendapatan yang didapatkan oleh Korea Selatan mengingat bahwa seberapa bergantungnya Korea Selatan dengan aktivitas ekspor dan juga ketergantungan perekonomiannya dengan China.

⁷ South Korea is caught between China and the United States. (n.d.).
<https://carnegieendowment.org/2020/10/21/south-korea-is-caught-between-china-and-united-states-pub-83019>

Selanjutnya terdapat faktor jangka panjang yang juga mengancam perekonomian Korea Selatan dalam masa waktu mendatang. Ancaman utama yang akan mengancam Korea Selatan tentunya datang dari China dimana dengan menurunnya angka *demand* dari China terhadap *intermediate goods* ini akan memunculkan niat dari China itu sendiri untuk memmanufaktur barang - barangnya sendiri yang tidak memerlukan lagi bantuan ekspor dari negara - negara luar seperti Jepang, Taiwan, dan juga termasuk Korea Selatan.⁸ Hal ini tentunya akan menjadi berita buruk yang tidak ingin didengar oleh pemerintah Korea Selatan mengingat China sebagai negara tujuan ekspor terbesar oleh Korea Selatan dan keterkaitan beratnya dengan China di bidang perekonomian. Konsep ini dinamakan konsep internalisasi dimana China sudah mulai mengganti barang - barang setengah jadi yang di impor dari negara - negara seperti Vietnam, Jepang, dan Korea Selatan dan menggantinya dengan barang - barang domestik sebagai pelengkap bagi produk jadi mereka.

Aktivitas ekspor dari Korea Selatan terhadap kedua negara ini yaitu AS dan China memiliki perbedaan yang cukup signifikan dimana ekspor Korea Selatan ke China lebih kepada barang – barang yang bersifat setengah jadi atau barang – barang suku cadang (*Intermediate Goods*). Hal ini dikarenakan oleh produksi dari *Intermediate Goods* dan mesin – mesin Korea Selatan lainnya sangat berkaitan dengan produksi barang jadi dari China yang beberapa juga akan masuk ke importir di Amerika Serikat.⁹ Oleh karenanya, Korea Selatan menjadi

⁸ Nam, E.-Y., & Kim, S.-T. (2020). The US-china trade war and the Korean economy's risk mitigating strategies. *Korea International Trade Research Institute*, 16(1), 113–129. <https://doi.org/10.16980/jitc.16.1.202002.113>

⁹ Ibid.

pemasok penting terhadap suku cadang dan juga barang – barang setengah jadi tadi. Sedangkan aktivitas ekspor ke Amerika Serikat lebih mengarah ke barang – barang sudah jadi atau *final goods* yang meskipun Korea Selatan dapat menjadi pemasok barang – barang sudah jadi tersebut kepada Amerika Serikat.

Selain itu juga ancaman nyata yang diberikan oleh China yang sedang mengalami perkembangan yang pesat. Melihat perkembangan China yang mulai menduduki kursi terdepan dalam perlombaan perkembangan teknologi dan juga IT ditambah dengan potensinya untuk mempercepat perkembangannya tersebut pasca sanksi tarif perdagangan yang diterima dari Amerika Serikat menjadikannya sebuah ancaman yang nyata terhadap negara - negara yang letak geografisnya berdekatan dengan China. Ditambah dengan bantuan dari perusahaan - perusahaan China seperti Alibaba, Haier, Tencent, Baidu, dan Alibaba perkembangan teknologi dan juga inovasi yang akan dialami China diperkirakan akan melebihi perkembangan dari Jepang dan bahkan akan merivali perkembangan dari Amerika Serikat.¹⁰ Hal ini akan secara langsung memberikan dampak yang buruk bagi Korea Selatan dengan semakin kuatnya China di kawasan sedangkan Korea Selatan masih berada di dilema dan tanpa adanya inovasi yang bahkan di beberapa sektor telah disalip oleh China dan berbagai macam perusahaan nya. Dampak negatif dari perang dagang ini meskipun menghambat Korea Selatan secara perekonomian akan tetapi memiliki titik terangnya sendiri dimana kesempatan membuka dan juga mengembangkan pasarnya di region - region lain seperti di region Amerika Latin dan juga negara - negara ASEAN yang menunjukkan

¹⁰ Shuquan, H., & Ju, S. (2020). The impact of China-US trade conflict on Korean economy. *SocioEconomic Challenges*, 4(4), 18–28. [https://doi.org/10.21272/sec.4\(4\).18-28.2020](https://doi.org/10.21272/sec.4(4).18-28.2020)

ketertarikan untuk menjalin kerjasama perdagangan dan ekonomi juga menjadi terbuka.¹¹

Sebagai bentuk respons dari Moon Jae In dan juga pemerintahan Korea Selatan terhadap menegangnya konflik antara Amerika Serikat dan juga China ini, Korea Selatan mulai mencari tujuan pasar alternatif yang dapat kembali meningkatkan persentase perekonomiannya yang sedang tertahan ini. Tentunya melihat opsi - opsi yang tercipta seperti Amerika Latin dan juga ASEAN + 1, Korea Selatan juga memiliki beberapa opsi yang sangat masuk akal dan melihat faktor internal yang akan dibahas di sub bab selanjutnya, maka sangat masuk akal bagi Moon Jae In dan juga pemerintahan Korea Selatan untuk melanjutkan dan mereaktivasi proses negosiasi kerjasama perekonomian IK-CEPA dengan Indonesia.

Variabel lain yang terdapat pada model adaptif Rosenau adalah *great power structure* yang berfokus kepada perubahan antara negara – negara *major power* yang dapat mendorong suatu negara untuk menciptakan kebijakan luar negeri baru untuk merespon situasi tersebut. Peristiwa perang dagang antara Amerika Serikat dan China ini tentunya menyebabkan perubahan di ruang lingkup global Negara – negara di dunia tentunya terganggu jalan roda perekonomiannya dikarenakan oleh posisi dan pengaruh baik itu Amerika Serikat dan juga China pada perekonomian dunia sehingga apapun yang terjadi terutama terkait dengan ketegangan perekonomian antara kedua negara tersebut akan menyebabkan negara – negara harus bersiap memberikan respon terhadap situasi tersebut. China yang

¹¹ Nam, E.-Y., & Kim, S.-T. (2020). The US-china trade war and the Korean economy's risk mitigating strategies. *Korea International Trade Research Institute*, 16(1), 113–129. <https://doi.org/10.16980/jitc.16.1.202002.113>

pada masa sekarang ini sudah naik menjadi penggerak ekonomi nomor 2 dunia, negara dengan konsumsi energi tertinggi di dunia, dan negara nomor 2 tertinggi pada pembelanjaan pertahanannya mulai menciptakan pergeseran di ranah internasional.¹²

Amerika Serikat yang telah memiliki pengaruh dan menjadi negara *major power* sejak lama tentunya menjadi terancam kekuatannya. Dengan kenaikan China tadi menjadikan dunia yang awalnya unipolar dimana ia berfokus pada Amerika Serikat sebagai negara super power, hingga sekarang menjadi multipolar dengan munculnya China sebagai saingan dari Amerika Serikat. Posisi China sekarang sudah sangat berpengaruh terhadap aktivitas dunia terutama pada sektor perekonomian hingga dimana meskipun ada aktor – aktor dari negara lain yang masuk dalam isu tersebut, tetap suara dari Amerika Serikat dan juga China yang sekarang menjadi patokan utama.¹³

Kenaikan China ini menunjukkan ketidakpuasan China terhadap sistem internasional di era sekarang ini dimana Xi Jin Ping sebagai Presiden dari China mengemukakan bahwa sistem internasional sekarang terlalu berfokus kepada nilai – nilai dari barat sehingga berdasarkan hal ini Amerika Serikat dapat secara terus menerus mengejar kepentingan politik dan juga menyebarkan pengaruh hegemoninya. Xi Jin Ping juga mengemukakan bahwa China juga harus memiliki pemahaman sistem internasionalnya sendiri yang tidak berfokus kepada barat dan

¹² Napang, M., & Rohman, S. (2022). The Trade War of China and the US in 2021, and its impact on the Indonesian economy. *Journal of Strategic and Global Studies*, 5(2), 1–23. <https://doi.org/10.7454/jsgs.v5i2.1102>

¹³ Fajgelbaum, P., Goldberg, P., Kennedy, P., Khandelwal, A., & Taglioni, D. (2023, June 10). *The “bystander effect” of the US-china trade war*. CEPR. <https://cepr.org/voxeu/columns/bystander-effect-us-china-trade-war>

segala ide – ide yang sangat kebarat – baratan. Oleh karenanya muncul sebuah persaingan strategis antara kedua negara dengan pengaruh besar ini yaitu Amerika Serikat dengan pengaruh hegemoninya pada berbagai sektor dan China sebagai aktor baru pada sistem internasional unipolar ini.¹⁴

Persaingan – persaingan ini kemudian juga mengarah kepada negara – negara di Asia Pasifik. China mulai menargetkan negara – negara periphery dan Amerika Serikat merespon dengan melakukan strategi yang juga berfokus kepada region Asia-Pasifik. Kedua negara ini kemudian melancarkan persaingan strategis untuk mendapatkan kontrol lebih dibanding yang lain pada sistem internasional. Xi Jin Ping kemudian memberikan fokus berlebih kepada konsep baru terkait dengan hubungan antar negara *major power* sebagai upaya pengelolaan kompetisi antara China dan AS yang diprediksi akan terus meningkat sejak naiknya ia sebagai Presiden China.¹⁵

Hingga pada akhirnya terjadi perubahan aktor pemimpin di Amerika Serikat dimana Barrack Obama digantikan dengan Donald Trump. Trump kemudian mengemukakan kebijakan “*America First*” yang mengutamakan kepentingan AS diatas lainnya. Hal ini kemudian dianggap sebagai sebuah rintangan bagi China. Ditambah dengan respon yang diberikan Trump terhadap isu China dengan Taiwan sehingga dinilai dapat melemahkan hubungan yang dimiliki oleh AS dan China. Beijing menganggap bahwa dengan naiknya Trump sebagai Presiden AS dengan kebijakan “*America First*”nya, hubungan antara AS dan China masih dapat dipertahankan melalui pemberian dan juga kerjasama

¹⁴ Bekkers, E., & Schroeter, S. (2020). An economic analysis of the US-china trade conflict. *WTO Working Papers*. <https://doi.org/10.30875/5b611474-en>

¹⁵ Ibid.

ekonomi antar kedua negara. Akan tetapi, administrasi Trump menganggap China sebagai kompetitor dan akhirnya mencetuskan perang dagang pada tahun 2018 yang menaikkan tarif antara kedua negara dan sekaligus menurunkan aktivitas perdagangan antar kedua negara tersebut.¹⁶

Kemudian terjadilah peristiwa wabah covid – 19 yang menjatuhkan image China sebagai negara diakrenakan oleh wabah yang berasal dari Wuhan, China ini. Amerika Serikat sendiri pun menerima dampak terburuk sebagai negara dengan angka infeksi tertinggi di dunia dan juga angka kematian tertinggi.¹⁷ Kerjasama antara AS dan China sempat dipertimbangkan untuk melawan wabah ini, akan tetapi tidak terrealisasikan hingga Presiden Trump menyalahkan China karena lamban dalam memberikan response awal dan penyebaran informasi. Meskipun begitu, merika Serikat dan China masih memiliki kebijakan yang menyebabkan kedua negara masih memiliki hubungan yaitu kebijakan “*engagement*” yang telah ada sejak era Presiden Nixon dari Amerika Serikat yang bertujuan untuk saling memiliki persaingan dengan China yang adil tanpa harus ada agresi di dalamnya.¹⁸ Melihat variabel *great power structure* dimana Meskipun Amerika Serikat dan China sangat sering berada di sisi yang berlawanan bahkan sejak lama baik itu terkait isu internasional maupun juga masalah ideologi ditambah dengan terjadinya perang dagang antara kedua negara

¹⁶ Fajgelbaum, P., Goldberg, P., Kennedy, P., Khandelwal, A., & Taglioni, D. (2023, June 10). *The “bystander effect” of the US-china trade war*. CEPR. <https://cepr.org/voxeu/columns/bystander-effect-us-china-trade-war>

¹⁷ Christensen, T. J. (2020a). A Modern Tragedy? Covid - 19 and U.S.-China Relations. *BROOKINGS : Foreign Policy*, 1–9.

¹⁸ Napang, M., & Rohman, S. (2022). The Trade War of China and the US in 2021, and it’s impact on the Indonesian economy. *Journal of Strategic and Global Studies*, 5(2), 1–23. <https://doi.org/10.7454/jsgs.v5i2.1102>

ini, akan tetapi hubungan antara kedua negara tersebut masih tidak berubah dimana masih ada kebijakan ”*engagement*” tadi. Sehingga dengan melihat melalui variabel *major power structure*, tidak ditemukannya perubahan yang terjadi pada hubungan antara Amerika Serikat dan China.

Variabel terakhir pada *external change* adalah aliansi dimana menurut Rosenau perubahan yang terjadi pada bentuk atau kebijakan yang muncul pada sebuah aliansi dapat mendorong suatu negara untuk mengeluarkan kebijakan baru. Korea Selatan memiliki beberapa rekan perdagangan seperti Indonesia, Vietnam, Amerika Serikat dan juga China. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rekan dagang utama dari Korea Selatan adalah China dan Amerika Serikat dan dengan adanya perang dagang ini, hubungan aliansi Korea Selatan dapat terancam dikarenakan oleh tuntutan dan sanksi – sanksi yang dimunculkan oleh kedua negara tersebut.

Melihat pembahasan sebelumnya bahwa Korea Selatan pada saat ini berada di posisi yang sulit melihat Amerika Serikat sebagai negara sekutunya dengan latar belakang yang sangat kuat, dan juga China sebagai salah satu rekan dagang yang memberikan Korea Selatan perputaran ekonomi ke-1 diantara negara – negara lainnya. Sehingga muncul dilema bagi Korea Selatan untuk memilih pihak antara AS dan China. Meskipun dampak yang diterima merupakan efek negatif yang memberikan penurunan kepada perekonomian Korea Selatan, akan tetapi terdapat kesempatan - kesempatan yang dapat dilakukan dan diambil oleh Korea Selatan itu sendiri untuk memanfaatkan posisi mereka yang sedang berada

dalam kondisi tertekan dan juga dilema.¹⁹ Hal tersebut dapat dilihat melalui *point of view* berpihak kepada Amerika Serikat dan juga berpihak kepada China. Di satu sisi, terlihat bahwa akibat dari peningkatan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap China mengakibatkan meningkatnya angka penjualan produk - produk dari Korea Selatan di pasar Amerika Serikat.²⁰ Peningkatan tersebut bahkan mencapai angka 1% dari angka biasanya yang meskipun peningkatannya bisa dikatakan sedikit, akan tetapi tetap saja hal tersebut merupakan sebuah hal positif diantara efek - efek *spillover* negatif yang diberikan oleh perang dagang ini.

Sedangkan dari perspektif China, Korea Selatan memiliki kedekatan yang sangat erat dengan China dimana sebagai pasar ekspor utama terbesarnya, China merupakan rekan kerjasama yang sangat berarti bagi Korea Selatan itu sendiri. Kehilangan pasar utama mereka tentunya akan semakin memperburuk situasi perekonomiannya yang saat ini tengah stagnan dan tentunya merupakan hal terakhir yang diinginkan oleh Korea Selatan dan juga pemerintahannya. Selain juga perspektif perekonomian, China menjadi salah satu *safety net country* yang menjadi penjaga ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Hubungan antara Korea Selatan dan China menjadi penting untuk menjaga Perang Korea untuk tetap damai dan tidak memancing perpecahan antara Semenanjung Korea.²¹

Tentunya pilihan Korea Selatan dalam perang dagang ini akan menentukan step

¹⁹ Friedhoff, K., Smeltzer, D., Kim, J. J., Swicord, E., Snyder, S. A., & Chungku, K. (2019). Cooperation and Hedging: Comparing US and South Korean Views of China. *The Asian Institute for Policy Studies*, 5.

²⁰ Lovely, M. E., Xu, D., & Zhang, Y. (2021). Collateral Benefits? South Korean Exports to the United States and the US-China Trade War. *Policy Brief*, 21(18), 1–18.

²¹ Ibid.

selanjutnya bagi hubungan antara Korea Selatan dan juga China yang secara tidak langsung mempengaruhi keamanan nasional bagi Korea Selatan itu sendiri dengan ancaman serangan nuklir dari Korea Utara.

Meskipun terdapat keuntungan dan kerugiannya sendiri yang berujung kepada dilemma berkelanjutan bagi Korea Selatan, mereka tetap tidak memilih satu atau negara lainnya baik itu China maupun Amerika Serikat untuk menjaga perdamaian dan tidak menerima dampak negatif berlebih akibat dari adanya perang dagang ini. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh Korea Selatan untuk memperkuat perekonomiannya yang saat ini sedang berada di bawah rata - rata dan bahkan dapat mengembangkan perekonomian nasionalnya hingga dapat bersaing dengan negara - negara hegemoni seperti Amerika Serikat dan China dan juga mulai dapat melepas ketergantungan perekonomiannya dengan negara - negara hegemoni tersebut. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perubahan dan tekanan terhadap aliansi yang ada, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi faktor utama Korea Selatan untuk mencetuskan kebijakan luar negeri baru sehingga variabel aliansi ini tidak berpengaruh kepada rasionalitas Korea Selatan untuk melanjutkan proses negosiasi kerjasama IK-CEPA bersama Indonesia.

3.2 Structural Change yang Mempengaruhi Korea Selatan dalam Pemberlanjutan Negosiasi IK-CEPA: Reformasi Perekonomian melalui New Southern Policy

Structural changes merupakan faktor – faktor yang berasal dari perubahan yang berawal dari dalam atau internal negara tersebut dimana faktor ini mengakibatkan negara tersebut untuk beradaptasi sebagai bentuk respon dari faktor perubahan struktural tadi. *Structural change* ini dapat beragam bentuknya mulai dari perubahan kepemimpinan, administrasi pemerintahan, pengeluaran kebijakan baru, dan segala hal yang berasal dari dalam atau internal negara berkaitan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Rosenau menjelaskan terdapat 9 variabel dari 2 sumber (masyarakat dan pemerintah) yang dapat mempengaruhi suatu negara dalam mencetuskan kebijakan luar negerinya, yaitu seperti letak geografis, pembangunan, *size*, opini publik, teknologi, budaya dan sejarah, struktur sosial dari masyarakat, struktur dari pemerintahan dan juga akuntabilitas politik.

Melihat variabel geografis, Korea Selatan merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Timur atau lebih tepatnya di semenanjung Korea. Semenanjung Korea sendiri terbagi menjadi 2 antara Korea Selatan dan juga Korea Utara yang terpisahkan oleh *demilitarized zone* yang telah tercipta sejak masa gencatan senjata di tahun 1953. Secara total, jumlah area yang dimiliki oleh Korea Selatan adalah 38.407 kilometer persegi dengan sekitar 3.580 pulau terpisah dari tanah utamanya.²²

²² *South Korea Country Handbook: Republic of Korea*. (2000). . Dept. of Defense.

Terkait dengan iklimnya, Korea Selatan memiliki iklim yang sedang dengan 4 musim utama yaitu musim panas, gugur, dingin, semi. Iklim dari Korea Selatan ini sangat dipengaruhi oleh letak geografisnya yang berada di semenanjung dan tinggi datarannya yang menengah. Angin monsun Asia Timur dengan hawa udara yang dibawa memberikan efek yang juga signifikan terhadap iklim dari Korea Selatan ini.²³ Musim panas biasanya hanya berlangsung sebentar, akan tetapi dipenuhi oleh hawa panas dan lembab yang dibawa oleh angin monsun tadi. Sedangkan musim dinginnya berlangsung lebih lama dan lebih dingin akibat dari keberadaan angin dingin Siberia. Keberadaan badai juga merupakan sebuah hal yang dapat di ekspektasikan dari iklim Korea Selatan. Biasanya badai ini datang pada pertengahan tahun dan sering membawa hujan deras yang merusak pertanian dan juga infrastruktur seperti rumah dan gedung.

Semenanjung Korea yang letak geografisnya strategis menyebabkan sering terjadinya ketegangan antara Korea Selatan dengan negara – negara di sekitarnya seperti China dan juga Jepang. Hubungan Korea Selatan dengan China kini telah membaik akibat hubungan perekonomian yang mereka miliki, akan tetapi Korea Selatan masih memiliki ketegangan sendirinya terhadap Jepang yang sempat menjajah mereka sebelum memberikan kemerdekaannya di tahun 1945.²⁴ Akan tetapi, perseteruan yang paling utama dan juga masih ada ketegangan hingga dewasa ini adalah dengan Korea Utara. Melihat sejarahnya, Semenanjung Korea sempat menjadi medan perang bagi kedua negara ini dimana Korea Selatan dengan bantuan dari Amerika Serikat dan juga Korea Utara dengan bantuan dari

²³ Ibid

²⁴ Sangchol, K., Jonghyuk, K., Eui-han, L., & Chi-young, J. (2016). *Geography of Korea. Understanding Korea.*

Uni Soviet. Perang Korea ini berlangsung selama 3 tahun dari 1950 hingga 1953 dan merenggut kurang lebih 2.5 juta nyawa baik itu dari warga sipil maupun militer yang berasal dari semua pihak terkait.²⁵ Perang Korea ini pada akhirnya berakhir dengan adanya gencatan senjata dan kedua negara menganggap bahwa perang ini tidak memberikan dampak positif bagi kedua pihak. Meskipun sudah berakhir, akan tetapi ketegangan antara keduanya masih ada hingga sekarang dimana Korea Utara masih memberikan tekanan dengan menembakkan rudal mereka ke area Korea Selatan dengan mengatasnamakan latihan perang. Selain itu juga ancaman dari Korea Utara yang paling utama terdapat pada persenjataan nuklirnya. Nuklir dari Korea Utara ini masih dikembangkan dan meskipun terdapat upaya untuk melakukan denuklirisasi dari berbagai pihak terutama Korea Selatan, Korea Utara masih mempertahankan persenjataan nuklirnya tersebut sebagai salah satu kekuatan militernya.

Model adaptif Rosenau menjelaskan bahwa faktor geografis dapat menjadi pendorong bagi sebuah negara untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri. Korea Selatan tidak mengalami perubahan geografis sejak terjadinya Perang Korea dan juga ancaman – ancaman dari negara tetangga termasuk Korea Selatan tadi sudah ada sejak lama dan tidak juga memberikan perubahan geografisnya sehingga penulis menentukan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap rasionalitas Korea Selatan dalam melanjutkan proses negosiasi IK-CEPA dengan Indonesia karena tidak adanya perubahan geografis dari Korea Selatan sehingga pemerintah tidak harus melakukan adaptasi terhadap perubahan tersebut.

²⁵ Carson, A. (2018). The Korean War (1950–1953). *Secret Wars*, 142–186. <https://doi.org/10.23943/princeton/9780691181769.003.0005>

Perkembangan perekonomian suatu negara menurut Rosenau dapat mendorong suatu negara untuk menciptakan kebijakan luar negeri baru. Semakin meningkatnya perekonomian suatu negara, maka akan semakin tinggi juga angka GNI atau *gross national income* yang dapat diberikan kepada sektor luar negeri negara tersebut begitu juga Korea Selatan.

Pada semester kedua tahun 2016, Korea Selatan sempat mengalami penurunan perkembangan sektor perekonomian. Namun, di tahun 2017 Korea Selatan berhasil mengembalikan perkembangan perekonomiannya yang di dorong oleh sektor IT dan juga konstruksi. Di tahun 2016, GNI Korea Selatan mencapai angka 1.50 Triliun Dollar AS dengan tingkat perkembangan di 3.0%, sedangkan di tahun 2017, GNI Korea Selatan mencapai angka 1.55 Triliun Dollar AS dengan tingkat perkembangan di 3.20%. Tren positif ini berakhir di tahun 2018 yang perkembangannya mencapai angka 1.69 Triliun akan tetapi terjadi penurunan di tingkat perkembangannya yang turun menyentuh angka 2,90% dan di tahun 2019 terjadi peningkatan GNI menjadi 1.75 Triliun akan tetapi penurunan kembali terjadi pada tingkat perkembangannya dengan 2.69%.²⁶

Perkembangan ini juga berdampak pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan terhadap kegiatan luar negeri. Peningkatan anggaran ini dapat terlihat di sektor militer Korea Selatan dimana sejak tahun 2016 mengalami kenaikan hingga pada tahun 2021 menjadi puncak dari angka anggaran militer Korea Selatan ini dengan 50873.80 Milyar Dollar AS. Namun pada tahun 2022, anggaran ini mengalami penurunan menjadi 46365.40 Milyar Dollar AS. Hal ini

²⁶ United Nations. (n.d.). *Undata | record view | GNI at current prices - US dollars*. United Nations. <https://data.un.org/Data.aspx?q=North%2Bkorea&d=SNAAMA&f=grID%3A103%3BcurrID%3AUDS%3BpcFlag%3A0%3BcrID%3A408%2C410%2C807>

menjadi alasan terhadap pengeluaran Korea Selatan di sektor militernya untuk mengalami peningkatan juga sebanyak sekitar 28% pada dekade terakhir.²⁷

Melalui pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa meskipun terdapat penurunan terhadap GNI Korea Selatan di tahun 2018 dan 2019, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi alasan pendorong bagi Korea Selatan untuk mencetuskan kebijakan luar negeri baru sehingga penulis menentukan bahwa variabel perkembangan ini tidak berpengaruh pada rasionalitas Korea Selatan untuk melanjutkan proses negosiasi kerjasama IK-CEPA.

Variabel *size* dapat dianalisa melalui dua faktor yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat dari negara tersebut karena dengan adanya perubahan populasi dan juga sumber daya alamnya maka suatu negara dapat terdorong untuk mencetuskan kebijakan luar negeri baru.

Pada tahun 2018, Korea Selatan memiliki jumlah populasi kurang lebih 51,6 Juta orang. Hal ini menunjukkan perkembangan sekitar 0.32% dari tahun sebelumnya. Hingga tahun 2023, Korea Selatan mencapai angka populasi sebesar 51,7 Juta. Jumlah populasi dari Korea Selatan ini sempat mencapai angka 51,8 Juta yang tertinggi dicapai pada tahun 2020. Akan tetapi, jumlah populasi tersebut terus menurun sejak tahun 2020, hingga sekarang turun sebesar 0.06% dari tahun 2022.²⁸ Tingkat kesuburan Korea Selatan juga merupakan sebuah isu yang telah lama di miliki oleh masyarakatnya dimana Korea Selatan merupakan satu – satunya negara di dunia dengan tingkat kesuburan di bawah 1 anak per wanita.

²⁷ *GNI per capita, PPP (current international \$)*. World Bank Open Data. (n.d.).
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD>

²⁸ *Population, total - korea, rep.* World Bank Open Data. (n.d.).
<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=KR>

Penurunan tingkat kesuburan ini juga merupakan penurunan paling cepat yang dialami oleh sebuah negara dimana populasi Korea Selatan hanya perlu waktu 60 tahun saja untuk turun dari angka 6 anak per wanita menjadi 0.8 anak per wanita.²⁹ Sehingga penurunan ini menjadi hal yang telah lama menjadi isu yang harus di tangani oleh Korea Selatan.

Penurunan tingkat kesuburan dari populasinya ini sejatinya merupakan isu yang menjadi perhatian dari semua negara, akan tetapi tentunya dengan angka di bawah 1 anak per wanita tersebut Korea Selatan harus mencari jalan keluar untuk permasalahan ini. Hal tersebut dikarenakan diperkirakan perlu tingkat kesuburan di angka 2.1 anak per wanita untuk dapat menggantikan populasi dari sebuah negara dan dengan tingkat kesuburan di bawah angka itu, populasi suatu negara akan menjadi tambah tua dan akan semakin menurun.³⁰ Hal ini akan berdampak kepada penurunan jumlah populasi juga sekaligus berdampak kepada pertumbuhan ekonomi suatu negara dimana semakin sedikit jumlah populasi negara tersebut maka akan semakin minim juga interaksi perekonomian yang dapat berujung kepada masyarakat dengan ekonomi rendah. Akan tetapi, penurunan tingkat kesuburan dari Korea Selatan ini didukung oleh pemerintah nya dimana dengan adanya penurunan tingkat kesuburan ini berujung kepada kondisi standard kehidupan yang lebih baik bagi pasangan menikah kemudian terdapat juga peningkatan pada sektor perekonomiannya dimana angka

²⁹ Dudley L. Poston Jr. Professor of Sociology. (2023, June 30). *South Korea has the lowest fertility rate in the world – and that doesn't bode well for its economy*. The Conversation. <https://theconversation.com/south-korea-has-the-lowest-fertility-rate-in-the-world-and-that-doesnt-bode-well-for-its-economy-207107>

³⁰ Plc, G. (n.d.). *The urban population of South Korea (2018 - 2026, people)*. <https://www.globaldata.com/data-insights/macroeconomic/the-urban-population-of-south-korea-137083/>

masyarakat muda dan tua menurun dan dipenuhi oleh masyarakat dengan umur produktif.³¹ Hal ini berujung kepada peningkatan *gross domestic product* (GDP) pada beberapa tahun dari Korea Selatan yang berada di angka 6% hingga 10% dan secara langsung mendorong Korea Selatan menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Pada akhirnya, isu ini memberikan dampak positif dan juga potensi dampak negatif bagi Korea Selatan di masa mendatang.

Terkait dengan sumber daya alamnya, kurang dari seperempat tanah di Korea Selatan digunakan sebagai lahan pertanian. Pendapatan nasional dari area pertanian juga menurun tiap tahunnya akibat dari berkurangnya dan semakin menuanya populasi yang hidup di daerah pedesaan. Ditambah dengan minimnya penggunaan mesin di bidang pertanian hingga berujung pada perkembangan dari sektor pertanian ini menjadi terhambat. Namun, pada dewasa ini, pemanfaatan mesin dan komersialisasi mulai sering digunakan oleh masyarakat sehingga produktifitas di sektor pertanian kembali mengalami perkembangan.³² Padi merupakan hasil pertanian paling penting, diikuti dengan daging babi, daging sapi, dan susu di bidang peternakan. Reforestasi juga dilakukan oleh Korea Selatan untuk menutupi lahan – lahan gundul dan merupakan proyek yang berhasil dilakukan untuk menumbuhkan kembali hutan di beberapa daerah gundul di Korea Selatan. Di bidang sumber daya mineral, Korea Selatan berada di posisi yang minim. Akan tetapi penyimpanan mineral penting adalah emas, perak, batubara antrasit, timah, seng, grafit dan tungsten dimana grafit dan tungsten

³¹ Ibid.

³² Ryu, S. Y., Lee, W., & Song, K. E. (2022). Natural resources. *Historical Statistics of Korea*, 373–453. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3874-2_8

menjadi salah satu deposit terbanyak di dunia. Tambang di Korea Selatan berpusat pada hasil biji besi dan juga batubara.³³

Sebagai salah satu variabel di *structural change* model adaptif James Rosenau, perubahan *Size* dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi negara untuk mencetuskan kebijakan luar negeri. Pada penelitian ini, meskipun terdapat perubahan pada sumber daya manusia pada populasi dan ancaman tingkat kesuburannya dan juga minimnya perubahan yang terjadi pada sumber daya alamnya tidak mendorong Korea Selatan untuk melanjutkan negosiasi IK-CEPA. Sehingga variabel *size* pada penelitian ini tidak mempengaruhi rasionalitas Korea Selatan untuk melanjutkan proses negosiasi kerjasama IK-CEPA dengan Indonesia ini.

Opini publik juga menjadi salah satu faktor penting yang mendorong suatu negara untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri baru, karena dukungan dari masyarakat juga penting untuk menjaga perdamaian internal dari negara tersebut, begitu juga halnya di Korea Selatan. Survey terkait opini publik Korea Selatan menunjukkan bahwa masyarakat dari Korea Selatan mayoritasnya peduli terhadap kebijakan luar negeri dari negaranya tersebut melihat dengan adanya ancaman nyata baik itu dari Korea Utara, Jepang, maupun China sekalipun, menjadikan mereka lebih *aware* terhadap kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁴

³³ 2017 - 2018 Minerals Yearbook - USGS Publications Warehouse. (2022). <https://pubs.usgs.gov/myb/vol3/2017-18/myb3-2017-18-korea-south.pdf>

³⁴ South Korean public opinion on the world in times of global turmoil - CEIAS. (n.d.). https://ceias.eu/wp-content/uploads/2022/09/Korean-poll-finaldraft-adjustments-3-1_rqt-1-2.pdf

Analisa lebih lanjut dari survey tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Korea Selatan mayoritasnya berpendapat negatif terhadap negara China dengan 77% darinya memandang China secara negatif, sedangkan Amerika Serikat menjadi negara yang dipandang paling positif diantara negara – negara lainnya dengan angka sekitar 75%. Akan tetapi pada sektor perdagangan dengan China, beberapa masyarakat dari Korea Selatan masih menganggap hal itu adalah sebuah hal positif meskipun lebih dari separuh (55%) masyarakatnya menganggap itu problematik.³⁵ Sehingga muncul situasi dimana Korea Selatan terletak diantara AS dan China karena meski masyarakatnya memiliki pandangan negatif terhadap China, hubungannya dengan China telah terjalin kurang lebih sejak 2.000 tahun yang lalu dan fakta bahwa China menjadi *trading partner* Korea Selatan terbesar dan hubungan Korea Selatan dengan AS juga tidak kalah kritis dimana AS dan Korea Selatan telah menjalin hubungan sejak masa perang Korea dan sejak saat itu pun menjadi partner baik di bidang keamaann maupun di bidang ekonomi yang penting bagi Korea Selatan.

Perpektif masyarkat terhadap persatuan semenanjung Korea juga meningkat, dimana masyarakat Korea Selatan mulai terbuka dan tertarik terhadap ide reunifikasi secara damai. Namun, hal tersebut tentunya tidak mudah untuk dilakukan karena terdapat faktor – faktor yang perlu dipertimbangkan lagi. Pada poin lain, masyarakat Korea Selatan memandang Indonesia dalam sudut pandang positif dengan persentase sekitar 58%.³⁶ Sehingga terlihat bahwa perspektif

³⁵ Ibid.

³⁶ Lee, C. M. (2020). A Peninsula of Paradoxes: South Korean Public Opinion on Unification and Outside Powers. *KOREAN SECURITY AND FOREIGN POLICY INITIATIVE*.

masyarakat Korea Selatan terhadap Indonesia lebih positif dan lebih terbuka terhadap Indonesia, dan menjadikan Indonesia sebagai opsi jika memang ingin mencetuskan kebijakan luar negeri di berbagai sektor.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa meskipun perubahan dari opini publik masyarakat Korea Selatan terkait kebijakan luar negerinya, tapi perubahan tersebut tidak menjadi faktor yang mendorong Korea Selatan untuk melanjutkan proses negosiasi IK-CEPA dengan Indonesia. Perubahan – perubahan – perubahan seperti perspektif warganya terhadap reunifikasi dengan Korea Utara dan juga perspektifnya terhadap China, AS, maupun Indonesia telah berlangsung lama dan tidak berkesinambungan dengan rasionalitas Korea Selatan melanjutkan negosiasi kerjasama IK-CEPA ini.

Struktur sosial dari negara – negara di Asia tidak sama dengan struktur sosial yang ada di Barat, akan tetapi memiliki beberapa kesamaan seperti adanya kaum kaya dan kaum miskin. Status perekonomian menjadi faktor penting dalam menentukan status sosial sebagai masyarakat Korea Selatan dimana semakin kaya seorang individu maka akan semakin tinggi dan dihormati lah dia. Pada zaman dahulu di era dinasti Joseon, struktur sosial terbagi menjadi 4 yaitu *yangban* yang berstatus sebagai bangsawan di posisi paling atas, *jungmin* sebagai kelas menengah, kemudian *sangmin* sebagai rakyat biasa, dan yang terakhir adalah *cheonmin* atau orang – orang buangan dan juga budak.³⁷ Sejak masa Joseon ini struktur sosial Korea Selatan sudah berpaku kepada tidak hanya perekonomian

³⁷ *Korea information - society*. Korean Cultural Center New York. (n.d.). <https://www.koreanculture.org/korea-information-society>

saja, akan tetapi kepada umur dan senioritas. Hal tersebut sangat melekat sampai dewasa sekarang pun meskipun tidak seketat dulu.

Di era modern Korea Selatan, senioritas dan juga status ekonomi masih menjadi standard sosial dalam segala bentuk interaksi antar masyarakat Korea Selatan. Ditambah dengan tingkat pada pekerjaan juga menjadi tambahan baru di konsep senioritas Korea Selatan sehingga muncul mindset untuk bekerja hingga tingkat paling tinggi agar dapat memastikan ia dan keluarganya dapat hidup nyaman. Mindset *success-oriented* ini sangat tertanam di kepala masyarakat Korea Selatan sejak dini yang menyebabkan semakin maraknya kompetisi antar individu sejak bangku sekolah dan berujung kepada belajar berlebihan. Meskipun memiliki sisi positifnya sendiri, hal ini juga memiliki sisi negatif yang berujung kepada hampir separuh dari masyarakat Korea Selatan (42.3% pria dan 47.6% wanita) mengalami stress akibat kompetisi dan tekanan sosial berlebihan.³⁸

Persaingan antar individu ini menjadikan isu kesehatan mental dan depresi menjadi isu yang marak terjadi antara masyarakat Korea Selatan dan berujung kepada aksi pengambilan nyawa diri sendiri. Angka bunuh diri di Korea Selatan mengalami kenaikan dengan angka 26 kematian per 100.000 populasi masyarakatnya dan kematian atas bunuh diri di Korea Selatan menjadi penyebab kematian nomor 6 di Korea Selatan³⁹. Hal ini menjadi urgensi penting karena

³⁸ Kim, S. Y., Yoo, D. M., Kwon, M. J., Kim, J. H., Kim, J.-H., Wee, J. H., & Choi, H. G. (2022, August 11). *Depression, stress, and suicide in Korean adults before and during the COVID-19 pandemic using data from the Korea National Health and Nutritional Examination Survey*. *Journal of personalized medicine*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9409979/>

³⁹ Jang, H., Lee, W., Kim, Y., & Kim, H. (2022). Suicide rate and social environment characteristics in South Korea: The roles of socioeconomic, demographic, urbanicity, general health behaviors, and other environmental factors on suicide rate. *BMC Public Health*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12843-4>

melihat angka bunuh diri di dunia mengalami penurunan dan menunjukkan bahwa kompetisi berlebihan dan tekanan sosial di Korea Selatan sangat tinggi. Dengan mindset tersebut juga berakar ke masalah lain seperti ketidaksetaraan antar masyarakat, pengangguran usia muda, dan juga angka kemiskinan relatif yang meningkat. Permasalahan seperti tingkat stress, ketidaksetaraan, kemiskinan, dan angka pengangguran muda yang tinggi menjadikan Korea Selatan sebagai negara dengan konflik sosial tertinggi ketiga di tahun 2019 hingga 2022 dari 34 anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* atau OECD dan terpaparkan bahwa konflik sosial ini menjadi isu yang harus dianggap serius oleh pemerintah Korea Selatan.⁴⁰

Konflik pada level sosial pada sebuah negara dapat menjadi faktor bagi negara tersebut untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri baru. Meskipun memang terdapat konflik sosial antara masyarakat Korea Selatan akibat dari adanya ketidaksetaraan, angka pengangguran, dan angka kemiskinan yang terus meningkat, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi faktor pendorong bagi Korea Selatan untuk melanjutkan proses negosiasi IK-CEPA bersama Indonesia, sehingga penulis menyimpulkan bahwa variable struktur sosial ini tidak memberikan pengaruh pada penelitian ini.

Membahas tentang teknologi, suatu negara dapat semakin berkembang dan maju selaras dengan perkembangan dari teknologi yang dimiliki oleh mereka itu dan dengan semakin majunya sebuah negara maka akan muncul kebijakan luar negeri baru yang dikeluarkan oleh pemerintahnya. Hal tersebut juga berlaku bagi

⁴⁰ Jae-hee, C. (2021, August 19). *S. Korea's conflict index ranks 3rd among OECD countries: Report*. The Korea Herald. <https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210819000846>

Korea Selatan dimana melihat sejarahnya yang kelam, Korea Selatan dapat mengubah jalan perkembangan negaranya tadi hingga menjadi salah satu negara *powerhouse* di dunia terkait dengan teknologi dan informasi.

Korea Selatan yang sempat menjadi negara miskin dulunya, sekarang dapat menduduki posisi kedua dibelakang Jerman pada index inovasi dari Bloomberg. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan sukses dan berhasil mengoptimalkan sektor *research and development* (RnD) nya sehingga dapat maju sebagai salah satu negara influensial di bidang inovasi dan teknologi. Perkembangan ini dimulai dari era pemerintahan Park Chung Hee, dimana beliau berhasil mengubah perekonomian Korea Selatan pasca perang Korea hingga menjadi seperti sekarang ini dimana dukungan penuh yang diberikan oleh Park Chung Hee terhadap sektor RnD menjadi batu pijakan bagi perkembangan teknologi di Korea Selatan.⁴¹ Dengan adanya dukungan penuh ini kemudian memunculkan kelompok Chaebol yang menjadi investor terbesar terhadap sektor RnD Korea Selatan ini.

Salah satu bukti maju nya perkembangan teknologi dari Korea Selatan dapat dilihat dari suksesnya Samsung di pasar dunia. Samsung yang awalnya bergerak di bidang perdagangan kelontong, sudah berkembang ke berbagai jenis sektor seperti elektronik, perkapalan, konstruksi, dan juga asuransi dan pada tahun 2018 berhasil menyumbang 15% kepada GDP Korea Selatan.⁴² Hingga saat ini, Samsung masih menjadi contoh bagi perusahaan elektronik lain di dunia dan

⁴¹ A global powerhouse in Science and Technology - OECD. (2021).

<https://www.oecd.org/country/korea/thematic-focus/a-global-powerhouse-in-science-and-technology-61cbd1ad/>

⁴² Dayton, L. (2020). How South Korea made itself a global innovation leader : A top-down reinvention. *Nature Index*, 581, 54–58. <https://doi.org/doi>: <https://doi.org/10.1038/d41586-020-01466-7>

menjadi salah satu perusahaan Chaebol di Korea Selatan yang membantu menyumbang kepada pendapatan negara.

Pemerintah Korea Selatan juga memberikan dukungan penuh terhadap sektor RnD dan dibantu dengan penerus dari Park Chung Hee yang juga secara terus menerus mempromosikan sektor RnD sebagai tulang punggung dari ekonomi nasional Korea Selatan.⁴³ Hingga pada akhirnya Korea Selatan dapat memasuki pasar semikonduktor dan juga smartphone yang dipimpin oleh Samsung Electronics di bidangnya, menetapkan posisi Korea Selatan menjadi salah satu negara terdepan di sektor inovasi elektronik dan juga teknologi. Pada tahun 2010an, sektor teknologi Korea Selatan semakin menunjukkan kekuatan mereka di bidang teknologi dengan kemunculan perusahaan – perusahaan di bidang broadband, bioteknologi dan juga *artificial intelligence* atau AI. Kemunculan perusahaan – perusahaan ini dibantu secara penuh oleh pemerintahnya dan dukungan penuh dari pemerintah Korea Selatan terhadap sektor teknologi inilah yang menjadi faktor krusial terhadap perkembangan teknologi dan inovasi dari Korea Selatan itu sendiri.

Rosenau menjelaskan bahwa perkembangan teknologi yang pesat tidak selalu mempengaruhi pencetus kebijakan luar negeri suatu negara, akan tetapi perkembangan teknologi ini dapat mempengaruhi sektor – sektor yang secara langsung menjadi pencetus kebijakan luar negeri suatu negara. Kemajuan Korea Selatan di bidang teknologi dan inovasi tentunya dapat meningkatkan kapabilitas Korea Selatan dalam membuat kebijakan luar negeri dan sekaligus secara dapat

⁴³ Ibid.

mempengaruhi secara langsung terhadap pencetus kebijakan luar negerinya. Akan tetapi, perkembangan dan kemajuan ini tidak memberikan dampak secara langsung terhadap rasionalitas Korea Selatan dalam melanjutkan proses negosiasi IK-CEPA bersama Indonesia.

Budaya dan sejarah dari Korea Selatan merupakan sebuah hal yang menarik bagi beberapa ahli untuk dipelajari. Budaya Korea Selatan telah menjadi konsumsi publik internasional dan ditambah dengan penyebaran globalisasi menjadikan penyebaran budaya dari Korea Selatan ini menjadi salah satu penyebaran budaya yang berjalan dengan sangat lancar. Budaya – budaya dari Korea Selatan baik itu tradisional maupun yang modern sangat mudah untuk diterima di berbagai negara. Budaya tradisional seperti penggunaan hanbok atau baju adat Korea Selatan menjadi salah satunya dimana nilai budaya yang dimiliki oleh sebuah hanbok ini menjadi suatu hal yang menarik bagi masyarakat dunia maupun juga turis yang berkunjung. Makanan – makanan tradisional seperti kue beras atau *tteok* atau kue beras dari Korea dan *kimchi* atau olahan sayur – sayuran yang di fermentasi juga sudah dikenal oleh dunia. Sedangkan budaya Korea modern mencakup *hallyu* atau gelombang Korea yang menyebar di berbagai lapisan masyarakat dunia. *Hallyu* ini mencakup musik pop Korea atau K-pop, sinetron Korea atau K-drama, film – film Korea, dan juga produk – produk yang di konsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat dunia seperti *skincare* atau kesehatan tubuh.⁴⁴

⁴⁴ Trunfio, M. (2015). *Hallyu and Soft Power: The Impact of the Korean Wave*.

Jumlah penggemar dan konsumen dari *hallyu* ini terus meningkat dan Korea Selatan juga dibantu oleh pemerintahnya dalam penyebaran budayanya ini dengan memberikan dukungan penuh baik moral ataupun secara moneter untuk terus mengembangkan dan menyebarkan budaya Korea Selatan ini melihat dampak positif yang dibawa oleh penyebaran ini pada berbagai sektor, terutama pariwisata dan ekonomi. Dengan tingginya angka konsumen dan penggemar *hallyu* tadi, bahasa Korea juga menjadi salah satu bahasa yang menarik minat masyarakat global.⁴⁵ Dibanding dengan kanji Jepang ataupun alfabet China yang memiliki kesulitannya masing – masing, *hangeul* atau alfabet Korea merupakan typografi yang cukup mudah untuk di pelajari melihat bahwa alfabet dan penggunaannya tidak serumit kanji Jepang maupun alfabet China. Dengan kemudahan ini menjadikan bahasa Korea menjadi salah satu bahasa yang menarik untuk dipelajari oleh masyarakat Global.

Melihat sejarahnya, seperti yang sudah dijelaskan pada bab – bab sebelumnya dimana Korea Selatan memiliki sejarah yang cukup panjang. Baik dari masa dinasti Korea yang sempat menguasai semenanjung Korea hingga era demokrasi sekarang yang di bawa oleh Amerika Serikat. Terdapat beberapa dinasti yang sempat memimpin Korea di masa lampau, seperti dinasti *Gojoseon*, era tiga kerajaan (*Sila*, *Goguryeo*, dan *Baekje*), *Joseon*, hingga kekaisaran Korea Raya. Korea sendiri sempat menjadi negara jajahan dari Jepang hingga di

⁴⁵ Jungsoo, K. (2016). Success without design: Hallyu (korean wave) and its implications for cultural policy. *The Korean Journal of Policy Studies*, 31(3), 101–118. <https://doi.org/10.52372/kjps31305>

merdekakan pada tahun 1945.⁴⁶ Pasca kemerdekaannya, Korea mengalami peristiwa pahit yaitu terjadinya perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sama halnya dengan Korea Utara yang menganut ideologi komunisme yang dibawa oleh Uni Soviet, Ideologi Korea Selatan juga datang dari Amerika Serikat yang membantu Korea Selatan selama masa perang Korea tersebut. Hingga akhirnya terjadi gencatan senjata dan Korea Selatan jatuh sebagai negara di berbagai sektor terutama perekonomian.

Akan tetapi pasca keterpurukan itu, Korea Selatan mampu bangkit melalui peristiwa “*Miracle on Han River*” yang menjadi titik balik perekonomian Korea Selatan. Perkembangan tersebut terus berlanjut hingga sekarang dan membentuk Korea Selatan menjadi salah satu negara influensial baik di kawasan maupun di dunia. Korea Selatan kini terkenal dengan salah satu negara pusat inovasi baik pada bidang teknologi, kesehatan, entertainment, dan juga perdagangannya.⁴⁷

Variabel budaya dan sejarah dijelaskan oleh James Rosenau dapat mendorong sebuah negara untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri baru. Akan tetapi, meskipun terdapat perubahan baik dari segi kebudayaan maupun sejarah, hal tersebut telah berlangsung sejak lama dan juga perkembangan ini membuat Korea Selatan membuat kebijakan luar negeri baru, akan tetapi tidak berkaitan dari fokus penelitian ini. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa variabel budaya dan sejarah tidak mempengaruhi Korea Selatan untuk melanjutkan proses negosiasi IK-CEPA dengan Indonesia.

⁴⁶ Korean Cultural Center. (2022). *Korea information - history*. Korean Cultural Center New York. <https://www.koreanculture.org/korea-information-history>

⁴⁷ Korean Cultural Center. (2022). *Korea Information - culture and the arts*. Korean Cultural Center New York. <https://www.koreanculture.org/korea-information-culture-and-the-arts>

Melihat struktur pemerintahan dari Korea Selatan sebagai negara republik dan telah diatur oleh Konstitusi dari Korea Selatan, memiliki 3 badan pemerintahan utama yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Menurut Konstitusi, badan eksekutif terdiri atas Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus sebagai komandan tertinggi di militer Korea Selatan. Presiden dari Korea Selatan memiliki kekuasaan yang sangat besar dimana Konstitusi menjelaskan bahwa Presiden memiliki kuasa penuh jika suatu saat terjadi krisis dan ancaman baik itu internal maupun eksternal, bencana alam, ataupun kekacauan perekonomian yang parah untuk memberikan perintah atau tindakan yang dapat berlaku sebagai hukum untuk merespon situasi tersebut. Presiden juga memiliki kuasa untuk mengerahkan kekuatan militernya jika suatu saat terjadi situasi yang mengancam keamanan nasional atau keamanan publik dimana jika pada saat itu suara Majelis Nasional Korea Selatan tidak dapat diandalkan atau tidak ada pada saat genting tersebut. Seorang Presiden Korea Selatan menjabat selama 5 tahun dan pasca masa pemerintahannya habis maka akan dilakukan pemilihan umum untuk mencari penerus dari Presiden Korea Selatan.⁴⁸

Selain Presiden, badan eksekutif diisi juga dengan Perdana Menteri dan Dewan Kabinet. Posisi Perdana Menteri ditentukan oleh Presiden Korea Selatan dengan persetujuan dari majelis nasional Korea Selatan. Keberadaan Perdana Menteri ini berperan untuk membantu Presiden dan juga sebagai wakil ketua dari Dewan Kabinet tadi. Jika suatu saat Presiden tidak dapat bertugas atau posisi

⁴⁸ *Executive, legislature and the judiciary: Korea.net : The Official Website of the Republic of Korea*. Korea.net. (2022). <https://www.korea.net/Government/Constitution-and-Government/Executive-Legislature-Judiciary>

Presiden Korea Selatan saat itu kosong, maka Perdana Menteri mengambil alih kuasa Presiden untuk mengawasi jalannya pemerintah dan juga kementerian. Sedangkan Dewan Kabinet anggotanya berasal dari saran yang diberikan oleh Perdana Menteri oleh Presiden yang nantinya akan melantik anggota – anggota dari Dewan Kabinet ini. Tugas dari Dewan Kabinet ini mencakup tugas kabinet pada umumnya seperti budget, alokasi kekuasaan di badan eksekutif, dan urusan penting di badan militer. Selain itu juga Dewan Kabinet memiliki tanggung jawab pada deklarasi perang dan penyelesaian dengan perdamaian dan juga draft amandemen kepada konstitusi.⁴⁹

Badan legislatif pemerintahan Korea Selatan diisi oleh Majelis Nasional Korea dimana Majelis Nasional Korea ini berperan sebagai wakil dari rakyat Korea Selatan dan juga pencetus dari undang – undang negara. Anggota dari Majelis Nasional ini terdiri atas 300 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif dan menjabat selama 4 tahun. Selain sebagai pencetus, memberlakukan dan mengubah undang – undang negara, Majelis Nasional negara juga dapat mengajukan amandemen kepada Konstitusi dan juga memiliki hak untuk menyetujui dan juga meratifikasi perjanjian internasional dan juga deklarasi perang. Tidak hanya itu, Majelis Nasional memiliki kuasa untuk menentukan RUU APBN Korea Selatan dan juga memiliki hak untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memberhentikan Perdana Menteri ataupun anggota dari Dewan Kabinet.⁵⁰ Konstitusi juga juga menjelaskan bahwa Majelis Nasional memiliki hak untuk melancarkan mosi penurunan terhadap Presiden,

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

Perdana Menteri, anggota – anggota Dewan Kabinet, dan juga hakim – hakim dari Mahkamah Konstitusi.

Proses penurunan jabatan dari Presiden ini wajib untuk diajukan oleh mayoritas dari anggota Majelis Nasional dan kemudian disetujui oleh dua per tiga anggota Majelis Nasional. Pasca mosi ini disetujui, maka Presiden tersebut dilarang untuk menggunakan kekuasaannya. Mosi penurunan jabatan ini terjadi terhadap Presiden Park Geun-Hye yang berhasil didorong untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden dan digantikan oleh Moon Jae In.⁵¹

Bidang yudikatif pemerintahan Korea Selatan terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berisi satu Ketua mahkamah agung dan 13 hakim agung dengan masa jabatan selama 6 tahun. Konstitusi menjelaskan bahwa Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Presiden dengan izin dari Majelis Nasional sedangkan hakim anggota dari Mahkamah Agung lainnya juga diangkat oleh Presiden atas saran dari Ketua Mahkamah Agung dengan izin dari Majelis Nasional. Ketua Mahkamah Agung yang masa jabatannya telah usai tidak bisa lagi diangkat kembali menjadi Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berisi 9 hakim yang diangkat secara resmi oleh Presiden dimana 3 diantaranya merupakan pilihan dari Majelis Nasional dan 3 lagi berdasarkan saran dari Ketua Mahkamah Agung.

Terdapat juga badan – badan lain yang juga memiliki andil pada pemerintahan Korea Selatan. Seperti pemerintah daerah Korea Selatan yang mengawasi 9 provinsi, 6 kota metropolitan, 1 kota istimewa yaitu Seoul sebagai

⁵¹ Trisni, S., Nasir, P. E., Isnarti, R., & Ferdian. (2019). South Korean government's role in public diplomacy: A case study of the korean wave boom. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 8(1), 31. <https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.31-42.2019>

ibu kota negara Korea Selatan, dan kota spesial dengan pemerintahnya sendiri yaitu Sejong. Pembagian secara lokal menjadikannya lebih beragam dimana terdapat *si* atau kota, kabupaten atau *gun*, distrik atau *gu*, kota kecil atau *eup* dan kotapraja atau *myeon*, daerah atau *dong*, dan kampung atau *ri*. Pemerintah daerah pada awalnya tidak dapat melakukan pemilihan umum dikarenakan oleh kontrol dari pemerintah pusat yang ketat, akan tetapi dewasa ini pemerintah daerah mengadakan pemilihan daerah berkala setiap 4 tahun sekali. Meskipun begitu, pemerintah daerah masih bergantung secara berat kepada pemerintah pusat sehingga masih ada andil dari pemerintah pusat dalam pemerintahan daerah.⁵²

Kemudian juga terdapat kaum *chaebol* yang merupakan konglomerat dengan dasar keluarga yang mendominasi perekonomian Korea Selatan. Keberadaan kaum *chaebol* ini mulai naik ke permukaan pasca terjadinya kudeta militer tahun 1961 dan keberadaan kaum *chaebol* ini di dunia politik membuka jalur kepada korupsi melalui penyuapan politikus dan bahkan presiden. Angka dari suap ini bahkan mencapai ratusan juta hingga milyar jika diakumulasikan. Sistem demokrasi dinilai menjadikan upaya pengaruh politik kaum *chaebol* ini menjadi semakin meningkat dan setiap perbaikan dan reformasi yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh politik kaum tidak berhasil akibat dari bisnis – bisnis berpengaruh di Korea dan penolakan dari internal birokrasi dan bahkan juga potensi yang dimiliki kaum *chaebol* ini terhadap isu reunifikasi dengan Korea Utara.⁵³

⁵² *Korea information - government*. Korean Cultural Center New York. (2022). <https://www.koreanculture.org/korea-information-government>

⁵³ Jochheim, U. (2022). The political system of the Republic of Korea. *BRIEFING : Continental Democracies*, 1–10.

Struktur pemerintahan Korea Selatan sebagai negara republik tentunya menganut 3 pilar utama yaitu eksekutif yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, legislatif dengan Majelis Nasional yang memiliki kuasa untuk mengatur undang – undang dan mengawasi jalannya pemerintahan, dan juga yudikatif yang berisi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Peran badan – badan lain terhadap pemerintahan Korea Selatan secara menyeluruh seperti pemerintah daerah dan pengaruh kaum *chaebol* juga membantu menggerakkan pemerintah Korea Selatan secara menyeluruh. Melalui pemaparan tersebut, penulis menyimpulkan tidak ada perubahan dari struktur pemerintahan Korea Selatan sehingga Korea Selatan tidak perlu beradaptasi kepada suatu situasi baru yang mengharuskan mereka untuk mencetuskan kebijakan luar negeri baru.

Variabel yang terakhir adalah akuntabilitas politik akuntabilitas politik merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap masyarakat dari negaranya dan bentuk pertanggung jawaban ini dapat dilihat pada pelaksanaan pemilu di negara tersebut, terdapatnya persaingan partai, dan juga kegiatan pemerintah untuk aktivitas luar negeri. Pemerintah Korea Selatan telah melakukan pertanggung jawaban terhadap masyarakat dengan mengadakan pemilihan umum pada tahun 2017 dengan naiknya Moon Jae In sebagai Presiden Korea Selatan ke – 19.

Kenaikan Moon Jae In sebagai Presiden merupakan hasil dari mosi penurunan jabatan yang dilakukan oleh Majelis Nasional Korea Selatan terhadap Presiden Park Geun-Hye dimana administrasi pemerintahannya menunjukkan

kalau Park Geun-Hye tidak cocok atau tidak mampu memimpin Korea Selatan. Mulai dari kebijakan – kebijakan yang tidak demokratis, pencetus kebijakan luar negeri yang menghalau pergerakan Korea Selatan untuk maju, hingga skandal korupsi menyebabkan akhirnya Majelis Nasional memaksa turun Presiden ke – 18 Korea Selatan tersebut.⁵⁴

Pemilihan umum ke – 19 ini memiliki 5 kandidat yaitu Moon Jae In, Hong Jun Pyo, Ahn Cheol Soo, Yoo Seung Min, dan Sim Sang Jung. Dari kelima kandidat tersebut, Moon Jae In menerima suara terbanyak sebesar 41% dan disusul oleh Hong Jun Pyo dengan 24%. Akibat dari penurunan paksa Park Geun Hye, Moon Jae In langsung menjabat dan diangkat oleh Majelis Nasional satu hari setelah terjadinya pemilihan umum.⁵⁵

Partai politik di Korea Selatan di dominasi oleh kaum liberalis dan juga kaum konservatif dimana partai politik yang mendominasi pada saat itu adalah Partai Demokrat Korea dengan ideologi liberalis, Partai Kebebasan Korea dengan ideologi konservatif, Partai Rakyat dengan mindset sayap tengah dan Partai Keadilan yang bersayap kiri. Dengan kaum liberalis dan konservatif yang mendominasi sehingga Partai Demokrat Korea dan Partai Kebebasan Korea menjadi dua partai politik yang sangat bersaing di era itu.⁵⁶

Melalui pemaparan diatas, penulis menganalisa bahwa persaingan partai politik dari Korea Selatan tidak mengalami perubahan dengan Partai Demokrat Korea dan Partai Kebebasan Korea yang saling bersaing tidak terdapat perubahan

⁵⁴ Heo, U., & Yun, S. Y. (2018a). South Korea in 2017: Presidential Impeachment and Security Volatility. *Asian Survey*, 58, 65–72. <https://doi.org/10.1525/as.2018.58.1.65>

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Jochheim, U. (2022). The political system of the Republic of Korea. *BRIEFING : Continental Democracies*, 1–10.

signifikan. Pengawasan badan legislatif terhadap pemerintahan juga sudah dilaksanakan melihat mosi penurunan jabatan terhadap Park Geun Hye dari posisinya sebagai Presiden karena dinilai merugikan negara dan tidak dapat memimpin negara ini secara benar. Pengadaan pemilu juga telah dilakukan pada tahun 2017 dengan pemilihan umum presiden yang pada akhirnya menyebabkan Moon Jae In terpilih sebagai Presiden ke – 19. Akan tetapi terdapat perubahan yang di bawa oleh kenaikan Presiden Moon Jae In sebagai Presiden Korea Selatan terhadap kegiatan luar negeri Korea Selatan dimana Moon Jae In yang telah menargetkan untuk meningkatkan hubungan diplomasi dengan ASEAN + 1 menyebabkan Korea Selatan memiliki fokus baru yaitu kebijakan *New Southern Policy* yang berujung kepada perubahan pada variabel kegiatan pemerintah Korea Selatan terhadap aktivitas luar negerinya.

Pemulihan perekonomian merupakan fokus utama bagi Korea Selatan dimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa Korea Selatan mengalami penurunan dalam perkembangan di sektor perekonomiannya. Penurunan ini mulai terlihat jelas pada tahun 2018 dan memuncak pada tahun 2019 dengan perkembangan yang mencapai angka 2% saja di tahun itu.⁵⁷ Meskipun tetap mengalami perkembangan, akan tetapi angka tersebut merupakan persentase perkembangan terendah oleh Korea Selatan sejak tahun 2009 atau kurang lebih satu dekade, sehingga hal tersebut menjadi sebuah isu yang bersifat *urgent* bagi Korea Selatan untuk mencari jalan keluarnya dan melalui kemunculan *new southern policy* ini

⁵⁷ IMF. (2019, May). *IMF country report no. 19/132 Republic of Korea*. REPUBLIC OF KOREA 2019 ARTICLE IV CONSULTATION—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STATEMENT BY THE EXECUTIVE DIRECTOR FOR THE REPUBLIC OF KOREA. <https://www.imf.org/~media/Files/Publications/CR/2019/1KOREA2019001.ashx>

lah dapat menjadi perubahan kepada kebijakan luar negeri Korea Selatan yang dulunya sangat AS-China sentris yang berubah untuk membuka pasar dan jalan perekonomian baru di berbagai negara lainnya dan salah satunya adalah negara - negara ASEAN + 1.

New Southern Policy sendiri merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan juga hubungan dari Korea Selatan kepada negara – negara di ASEAN agar dapat seperti hubungan antara Korea Selatan dengan Jepang, China, dan Amerika Serikat.⁵⁸ Seperti namanya, kebijakan ini lebih condong mengarah ke region selatan dari Korea Selatan itu sendiri dan oleh karenanya, kebijakan ini berfokus kepada negara – negara di ASEAN dan juga India.

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, *New Southern Policy* ini memiliki 3 pilar utama yang menjadi titik tumpu dan tolak ukurnya yaitu *People, Peace, and Prosperity* dimana Korea Selatan bertujuan untuk saling memberikan bantuan dan dukungan untuk meningkatkan infrastruktur dan juga inovasi yang dapat menciptakan suatu situasi antara Korea Selatan dan juga ASEAN + 1 (India) yang sama - sama memiliki kemakmuran dan juga keadilan yang merata sehingga negara - negara di ASEAN + India juga dapat semakin bersaing di ranah Internasional dan tentunya dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi Korea Selatan.⁵⁹

⁵⁸ Dhawan, R. K. (2020). Korea's 'new southern policy' towards India: An analysis. *Jadavpur Journal of International Relations*, 24(1), 53–72. <https://doi.org/10.1177/0973598420906248>

⁵⁹ EFSAS. (2023). South Korea's New Southern Policy in Southeast Asia and India: Limitations and Opportunities. *European Foundation for South Asia Study Paper*, 2, 1–24.

Melihat pasar dunia dan juga rantai perdagangan yang mulai berkembang dan beragam, Korea Selatan mulai mencari pasar alternatif seperti Amerika Selatan yang perekonomiannya mulai mengalami kenaikan dan juga negara - negara di ASEAN dan juga India. Dengan naiknya Moon Jae In sebagai Presiden Korea Selatan kemudian beliau mengemukakan kebijakan baru yaitu *New Southern Policy* yang kebijakannya mengarah ke region selatan yaitu ASEAN dan juga India. Kebijakan yang menjadi ciri khas pada masa administrasi Moon Jae In ini menjadikan mengejar kerjasama dengan ASEAN + 1 ini menjadi pilihan yang masuk akal untuk dilakukan. Ditambah dengan fakta bahwa ASEAN saat ini telah memiliki 11 negara yang menjadi rekan dialognya antara lain adalah Amerika Serikat, China, Rusia, Australia, India, Jepang, Selandia Baru, Kanada, Uni Eropa, PBB, dan juga termasuk Korea Selatan. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu alasan mengapa *New Southern Policy* ini dinilai akan sangat membantu dan memberikan dampak yang positif bagi kedua belah pihak dan bisa dibilang mencapai sebuah *win-win solution* bagi keduanya hingga masa yang akan mendatang.

Sejatinya, Korea Selatan dan juga ASEAN juga memiliki sejarah dalam kerjasama antara kedua pihak jauh sebelum terciptanya kebijakan *New Southern Policy* ini. Sejak secara resmi menjadi rekan dialog dari ASEAN pada tahun 1991, Korea Selatan telah saling membantu membangun dan juga memberikan dukungan kepada ASEAN yang ditambah dengan pada tahun 2004 dimana Korea Selatan setuju untuk menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* atau TAC. Kemudian pada tahun 2007, Korea Selatan dan ASEAN

juga semakin meningkatkan kualitas dari hubungan kedua belah pihak dengan menyetujui *ASEAN-Korea Free Trade Area* atau AKFTA yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan antara kedua pihak baik dari negara - negara ASEAN ke Korea Selatan maupun juga sebaliknya.⁶⁰

Melalui berbagai bentuk kerjasama ini hubungan Korea Selatan dan juga negara - negara ASEAN semakin membaik. Tentunya dengan baiknya hubungan antara kedua negara, segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan kedua pihak menjadi semakin lancar terutama pada sektor perdagangan, investasi, pariwisata, dan juga pertukaran sosial budaya. Hingga pada akhirnya kedua pihak setuju untuk menjalin kerjasama *Joint Declaration on Strategic Partnership for Peace and Prosperity* pada tahun 2015 untuk semakin membangun hubungan antara Korea Selatan dan negara - negara ASEAN. Hal tersebut menjadikan ASEAN sebagai partner perdagangan terbesar kedua oleh Korea Selatan yang mengambil 14,4% dari total aktivitas perdagangannya secara internasional. Meskipun masih berada dibawah posisi China yang menduduki posisi pertama dengan 24%, akan tetapi posisi tersebut diatas pada posisi Amerika Serikat dengan 12%, Uni Eropa dengan 11%, dan juga Jepang dengan 7%. Selain itu juga, investasi langsung dari Korea Selatan ke negara - negara ASEAN meningkat sejak tahun 2009 yang pada awalnya bernilai \$ 1 juta dollar AS pertahun menjadi \$7 juta dollar AS per tahun pada tahun 2017.⁶¹

⁶⁰ Wongi, C. (2021). "New Southern Policy": Korea's Newfound Ambition in Search of Strategic Autonomy. *Asie Visions Ifri*, (118), 1-24.

⁶¹ Pradityo, R. (2022). South Korea's interest in ASEAN+1: New southern policy and peacebuilding. *Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 134-149.
<https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.18026>

Melalui perkembangan ini, Korea Selatan menjadi partner perdagangan dari ASEAN terbesar kedua dan juga menjadi tujuan investasi langsung terbesar ketiga dari Korea Selatan. Selain itu juga negara - negara ASEAN menjadi tujuan pariwisata terbesar dari masyarakat Republik Korea Selatan itu sendiri. Hal ini menjadikan Moon Jae In dan juga Korea Selatan untuk mengejar kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan juga India melalui kerjasama *New Southern Policy* ini. Proses pengejaran tersebut terbukti sebagai sebuah fokus penting bagi administrasi Moon Jae In, terutama melihat beberapa konferensi dan juga aktivitas – aktivitas kunjungan yang dilakukan olehnya kepada negara – negara ASEAN pada awal masa jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan.

Melalui beberapa kunjungan dan juga konferensi yang dilakukannya, Moon Jae In dan Korea Selatan menegaskan bahwa keberadaan dari *New Southern Policy* ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan hubungan dari kedua belah pihak, tidak hanya untuk memberikan keuntungan semata bagi Korea Selatan saja. Hal tersebut dapat tercapai melalui pembagian perkembangan infrastrukturnya kepada negara - negara di ASEAN dan juga Korea Selatan bersedia membantu menyediakan bantuan terhadap proyek perkembangan jangka panjang melalui bantuan perkembangan infrastruktur tersebut. Dengan adanya kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh Korea Selatan ini terhadap proses pembangunan infrastruktur dari negara - negara di ASEAN.

Tidak hanya untuk memenuhi kepentingan perkembangan infrastruktur dan ekonomi saja, akan tetapi juga terdapat faktor keamanan dan juga kedamaian yang berusaha dicapai. Tentunya hal tersebut berkaitan erat dengan keberadaan

kekuatan militer Korea Utara dan juga persenjataan nuklirnya.⁶² Hal ini merupakan hasil dari peperangan dan juga ketegangan antara Korea Utara dan juga Selatan yang bahkan hingga saat ini masih berlanjut dengan Korea Utara yang masih mengembangkan teknologi persenjataan nuklirnya. Meskipun ASEAN menganggap bahwa Korea Utara bukan merupakan ancaman utama di kawasan dikarenakan oleh level ketegangan yang cukup rendah dan juga stabil antara kedua pihak. Akan tetapi tentunya jika Korea Selatan berniat untuk menggunakan kekuatannya kepada Korea Selatan maupun juga Amerika Serikat, tentunya perdamaian dunia akan terguncang dan hal tersebut akan menjadi ancaman nyata secara global, termasuk juga kepada negara - negara ASEAN.

Mengacu kembali kepada salah satu pilar dari *New Southern Policy* ini, yaitu *peace* dimana Korea Selatan berusaha menciptakan *status quo* yang menjunjung tinggi perdamaian di kawasan, terutama di semenanjung Korea. Meskipun ASEAN tidak menganggap Korea Utara sebagai ancaman nyata ataupun ancaman secara langsung dan juga Korea Utara yang tidak terlalu menganggap negara - negara dengan *low-mid powers* sebagai ancaman besar, tetapi negara - negara anggota ASEAN sudah menyetujui untuk membantu proses denuklirisasi dari semenanjung Korea terutama terhadap Korea Utara dengan ancaman persenjataan nuklirnya.

Tentunya pasca lebih dari 3 dekade dalam pembentukan dan perkembangan dari hubungan antara Korea Selatan dan juga ASEAN bersama

⁶² Ibid.

dengan negara - negara anggotanya yang tidak hanya dipenuhi oleh hal - hal positif namun juga hal - hal yang masih bisa diperbaiki agar dapat memberikan dampak dan hasil yang lebih menguntungkan bagi kedua pihak terkait. Tentunya keberadaan *New Southern Policy* ini tidak bisa lepas dari salah satu cara dari Korea Selatan untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya, yaitu untuk membuka jalur baru untuk pasar Korea Selatan kepada negara - negara di Asia Tenggara dengan perekonomiannya yang sedang berkembang dengan pesat.⁶³ Namun kebijakan *New Southern Policy* ini juga memberikan dampak yang sangat baik bagi ASEAN dan juga India mengingat perkembangan infrastruktur dan juga kesempatan untuk mengembangkan sektor perekonomian mereka yang dapat dibantu oleh Korea Selatan terdengar sangat masuk akal untuk dilakukan. Oleh karena hal tersebutlah Moon Jae In dan Korea Selatan sangat tertarik untuk mereformasi sektor perekonomian dari Korea Selatan agar dapat beradaptasi kepada perubahan - perubahan baru dan memprioritaskan ASEAN sebagai salah satu tujuan utama dari kebijakan luar negeri Korea.

Berasarkan penjelasan beberapa variabel diatas, penulis menyimpulkan bahwa faktor *structural change* tidak dipengaruhi oleh semua variabel yang ada pada *structural change* tersebut dimana 9 variabel seperti geografi, *size*, perkembangan ekonomi, opini publik, teknologi, budaya dan sejarah, struktur sosial dari masyarakat, dan struktur dari pemerintahan tidak menjadi variabel pendorong Korea Selatan untuk melanjutkan proses negosiasi IK-CEPA meskipun pada variabel - variabel tersebut terdapat perubahan. Namun, pada variabel

⁶³ Dhawan, R. K. (2020). Korea's 'new southern policy' towards India: An analysis. *Jadavpur Journal of International Relations*, 24(1), 53-72. <https://doi.org/10.1177/0973598420906248>

akuntabilitas politik yang berfokus kepada tanggung jawab pemerintah Korea Selatan terhadap masyarakatnya dan salah satunya adalah pada poin aktivitas pemerintah untuk kegiatan luar negeri. Dengan naiknya presiden Moon Jae In sebagai Presiden Korea Selatan, administrasinya mengeluarkan kebijakan luar negeri yaitu *New Southern Policy* dengan tujuan untuk mengembangkan pasarnya ke region selatan dari Semenanjung Korea terutama dengan negara – negara ASEAN dan India. Oleh karenanya, penulis mencetuskan bahwa variabel akuntabilitas politik dan ditambah dengan faktor *external change* menjadi faktor pendorong bagi Korea Selatan untuk kembali melanjutkan proses negosiasi kerjasama IK-CEPA bersama Indonesia.

3.3 Faktor Leadership Role yang Mempengaruhi Korea Selatan dalam Pemberlanjutan Negosiasi IK-CEPA: Moon Jae-In sebagai Presiden Korea Selatan

Tentunya jika membahas terkait dengan pengambilan keputusan dari kebijakan suatu negara, maka pemimpin dari negara tersebut juga bagian dari faktor yang mempengaruhi dari proses pengambilan keputusan tersebut. Model adaptif Rosenau menjelaskan bahwa aktor pemimpin memiliki kuasa lebih terhadap keputusan suatu negara untuk mencetuskan kebijakan luar negeri baru. Hal tersebut ter contoh dari salah satu faktor yang telah dibahas di atas yaitu awal mulanya peristiwa perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang diawali oleh Presiden Trump yang menaikkan tarif barang - barang dari China. Pada akhirnya dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Trump tersebut menyebabkan goyahnya strata perekonomian global. Moon Jae In, sebagai aktor

Presiden dari Korea Selatan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi alasan Korea Selatan untuk melanjutkan proses negosiasi IK-CEPA bersama dengan Indonesia.

Seperti yang dibahas pada bab – bab sebelumnya, analisa variabel leadership lebih berfokus kepada individu pemimpin tersebut dan jika membahas terkait dengan individu maka juga harus membahas latar belakang dari pemimpin tersebut, tujuan dari aktor pemimpin tersebut, kemudian gaya kepemimpinannya, dan juga kekuatan dan kelemahan pemimpin tersebut dalam pengambilan sebuah keputusan. Melihat latar belakangnya, Presiden Moon Jae In terlahir pada tahun 1953 sebagai anak dari orang tua yang berstatus sebagai pengungsi yang membelot dari Korea Utara.⁶⁴ Oleh karena status dari orang tuanya sebagai pengungsi tersebut menyebabkan kehidupan di masa muda beliau menjadi sangat sulit terutama pada ranah sosial dan juga secara finansialnya. Meskipun dihadapi dengan masa muda yang cukup menantang dan sulit, hal tersebut tidak menghentikan Moon Jae In untuk tetap menuntut ilmu dengan tekun dan bahkan dikenal sebagai anak yang pandai dan pintar di sekolahnya dimana hal tersebut merupakan kebiasaan baik yang dibangunnya sejak SD hingga SMP. Namun ketika mulai memasuki masa sekolah di SMA, Moon Jae In mulai membangkang dan *rebel* meninggalkan kebiasaan baiknya yang telah dibangunnya sejak kecil tersebut.

Kebiasaan tersebut berlanjut hingga masa kuliahnya dimana Moon Jae In mulai menjadi aktivis yang melakukan protes kepada administrasi pemerintahan

⁶⁴ Hahm, S. D., & Heo, U. (2020). President Moon Jae-in at midterm: What affects public support for Moon Jae-in? *Journal of Asian and African Studies*, 55(8), 1128–1142. <https://doi.org/10.1177/0021909620911145>

Presiden Park Chung Hee yang pada saat itu dikritik sebagai pemimpin yang bersifat otoriter terhadap masyarakat Korea Selatan sehingga mulai banyak masyarakat yang merasa tertekan dan hilang demokrasi di negaranya sendiri. Sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Park Chung Hee dan memperjuangkan demokrasi negaranya, Moon Jae In melakukan protes dan juga demo untuk menurunkan Park Chung Hee sebagai presiden. Atas dalih dan campur tangannya pada aksi protes tersebut, Moon Jae In kemudian ditangkap dan sekaligus dikeluarkan (DO) dari kampusnya pada saat itu.⁶⁵ Pasca masa penjaranya selesai, Moon Jae In kemudian direkrut sebagai bagian dari Pasukan Perang Khusus Korea Selatan dan setelah melalui masa wajib militernya diberikan izin untuk kembali ke berkuliah dan menyelesaikan gelarnya di bidang hukum.

Moon Jae In sempat bercita - cita untuk menjadi hakim menggunakan gelarnya di bidang hukum tersebut dan bahkan berhasil lulus ujian pengacara dengan nilai yang memuaskan. Akan tetapi, akibat dari masa lalunya sebagai aktivis yang menentang masa pemerintahan Park Chung Hee dan sempat menghabiskan beberapa waktu di penjara mengakibatkan Moon Jae In tidak dapat diangkat menjadi seorang hakim dan pada akhirnya Moon Jae In pun pindah dari Seoul ke Busan dimana beliau menjadi pengacara Hak Asasi Manusia. Di Busan juga Moon Jae In bertemu dengan mendiang Presiden Roh Moo Hyun dan mulai membangun hubungan dengan beliau sebagai supporter dan juga teman dekat dari Roh Moo Hyun. Sejak saat itu lah karir dunia politik Moon Jae In di Korea Selatan bisa dikatakan bermula dan meskipun terdapat berbagai pendapat baik itu

⁶⁵ Ibid.

positif dan juga negatif terhadap karakteristik berpolitiknya, secara keseluruhan Moon Jae In dan administrasinya diterima dengan baik di kalangan masyarakat Korea Selatan.⁶⁶

Salah satu alasan mengapa publik Korea Selatan dapat dengan mudah menerima karakter yang dibawakan oleh Moon Jae In ini adalah penempatan posisi beliau yang bersifat terbuka, tidak terlalu formal, dan juga lebih santai terhadap publik.⁶⁷ Hal ini sangat kentara terlihat dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Park Geun Hye yang lebih tertutup terhadap anggota - anggota press dan bahkan tidak mengatur jadwal untuk tampil di konferensi pers dalam tahun pertama menjabatnya. Berbeda dengan Park Geun Hye, Moon Jae In lebih terbuka terhadap publik dimana ia tidak hanya meningkatkan angka penampilannya di publik dan konferensi pers akan tetapi juga tidak terpaku kepada skrip tertulis yang telah disediakan oleh staffnya. Oleh karena kebebasan ini, konferensi pers Moon Jae In membawa nuansa baru di karakter administrasinya dan semakin mendorong publik untuk merasa nyaman dan terhubung dengan Moon Jae In secara langsung. Bahkan Moon Jae In juga menerima pertanyaan - pertanyaan dari reporter baik itu domestik ataupun internasional. Segala kepribadian ini dibawa dan caranya untuk mengatur media oleh Moon Jae In kepada publik Korea Selatan semata - mata karena ingin memimpin sebuah pemerintahan yang bersifat transparan terhadap segala kebijakannya dan keputusannya dan melihat respon masyarakat setelah 100 hari

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ruzgar, Dr. N. (2019). Moon Jae in: A contemporary strategic and Visionary leader. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 6(2), 5291–5296. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v6i2.05>

masa pelantikannya yang masih bersifat positif terhadapnya menunjukkan bahwa jalur pendekatan yang beliau pilih adalah jalur yang benar.⁶⁸

Meskipun begitu tentunya terdapat masyarakat publik yang belum dapat menerima Moon Jae In dan belum luluh dengan karakteristiknya. Diatas karakternya yang bersifat akrab dan terbuka terhadap publik, masih ada masyarakat publik Korea Selatan yang menganggap hal tersebut kurang menarik dan hanya menutupi kurangnya karisma berpolitik dari Moon Jae In mengingat masa lalu nya di dunia berpolitik yang cukup singkat. Selain itu juga, Moon Jae In masih membingungkan beberapa pihak dimana beliau bersifat terbuka terhadap publik dan menginginkan pemerintahan yang transparan, beliau mengkontradiksi hal tersebut dengan menutup diri terhadap pihak - pihak dari oposisi. Selain itu juga meskipun menunjukkan keahlian komunikasi dan tata cara kontrol media yang cukup baik, beliau juga dikenal dengan pribadi yang keras kepala yang terbukti dengan kekerasan kepala beliau untuk tidak mau berkompromi apapun memberikan perubahan yang berarti terhadap suatu kebijakan meskipun kebijakan tersebut tidak memberikan hasil yang bagus atau diproyeksikan akan mengalami kegagalan. Hal ini menjadikan masih terdapatnya publik yang merasa kurang setuju dengan praktek politik yang dilakukan oleh Moon Jae In dan melakukan aksi protes akan hal tersebut. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa Presiden Moon Jae In bersifat tertutup kepada pihak oposisinya. Bahkan menurut salah satu reporter yang mengabarkan bahwa memang komunikasi yang dijalin oleh Moon

⁶⁸ Hahm, S. D., & Heo, U. (2020). President Moon Jae-in at midterm: What affects public support for Moon Jae-in? *Journal of Asian and African Studies*, 55(8), 1128–1142. <https://doi.org/10.1177/0021909620911145>

Je In terhadap pihak oposisi sangat minim dan hanya beberapa dari anggota - anggota seniornya yang pernah bertemu dengan Presiden Moon Jae In.

Berfokus kepada gaya kepemimpinannya, Moon Jae In telah membangun citra untuk membangun dan menata kembali hubungan antara Korea Selatan dan juga negara – negara anggota ASEAN +1 (India). Moon Jae In terlihat sudah terfokus dan keputusannya pun sudah bulat untuk secara serius menempatkan pembangunan dan penataan kersjasama Korea Selatan dengan ASEAN ini sebagai salah satu fokus utama bagi administrasi pemerintahannya. Keseriusan Moon Jae In ini terhadap pengejaran kerjasama bersama ASEAN ini terlihat melalui beberapa faktor seperti melalui aksi vokal dimana selama masa eleksinya sebagai calon Presiden Korea Selatan, Moon Jae In selalu menempatkan ASEAN sebagai prioritas utama dalam strategi kebijakan luar negerinya sebagai Presiden Korea Selatan.

Kemudian juga beliau melakukan kunjungan kepada negara - negara ASEAN pasca pemilihannya sebagai Presiden Korea Selatan pada 2 tahun pertama selama masa jabatannya. Hal ini ditunjukkan untuk semakin mempererat hubungan Korea Selatan dengan masing - masing negara dan juga dengan ASEAN secara menyeluruh. Kunjungannya ke beberapa negara seperti Kamboja dan Brunei Darussalam menjadi kunjungan dari Presiden Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir, dan juga menjadi Presiden Korea Selatan pertama yang mengunjungi negara Singapura.⁶⁹

⁶⁹ Ibid

Selain itu, sebagai Presiden dari Korea Selatan Moon Jae In memiliki kehendak untuk memperbaiki dan mengembangkan kebijakan luar negeri dari Korea Selatan terutama pada bidang perekonomian dan juga respons terhadap kebijakan nuklir dari Korea Utara yang tentunya menjadi ancaman di kawasan terutama Semenanjung Korea.⁷⁰ Semenjak Korea Utara diketahui memiliki program nuklir, Korea Selatan menjadikannya prioritas tinggi untuk di respon dan juga Amerika Serikat sebagai sekutu dan negara lainnya yang menganggap ancaman nuklir Korea Utara sebagai ancaman nyata. Seoul dan Washington merencanakan mediasi kepada Pyongyang sebagai bentuk respons untuk menekan program nuklir dari Korea Utara akan tetapi upaya untuk mengkomunikasikan hal itu tidak menemui titik terang dikarenakan dari Pyongyang dan Korea Utara yang tidak memberikan respon yang berarti. Oleh karena respons yang minim dari pihak Korea Utara, Presiden Moon Jae In lebih condong untuk melakukan konferensi tingkat tinggi atau *summit conference* dengan Kim Jong Un sebagai pemimpin dari Korea Utara. Hal ini disambut dengan baik oleh Kim Jong Un mengingat karakteristik Moon Jae In yang terbuka dan simpatis terhadap sebuah argumen dan permasalahan. Moon Jae In dan Kim Jong Un sempat beberapa kali melakukan pertemuan dan tidak terlihat ketegangan antara kedua pihak sehingga hal ini sangat baik untuk denuklirisasi dari Semenanjung Korea. Amerika Serikat juga ikut serta ambil peran pada proses denuklirisasi ini dimana Presiden Trump melakukan pertemuan juga dengan Kim Jong Un dimana meskipun tidak ada

⁷⁰ Mosler, H. B. (2017). President Moon Jae-in – The Right Choice for South Korea. *Asia Policy Brief*, 1–12.

pencapaian yang kentara atas pertemuan - pertemuan tersebut, Presiden Trump merasa yakin bahwa Korea Utara akan mengurangi aktivitas nuklirnya.⁷¹

Melihat mulai meredanya aktivitas nuklir di Semenanjung Korea, ditambah dengan media internasional yang memberikan berita secara langsung tentunya menjadikan Moon Jae In sebagai sosok yang dipuja - puja oleh masyarakat Korea Selatan.⁷² Kemudian juga kehendak dari masyarakat publik Korea Selatan sendiri menginginkan adanya denuklirisasi melihat ancamannya terhadap keamanan mereka, tidak heran bahwa rating dari publik terhadap Moon Jae In tetap tinggi meskipun memiliki beberapa kekurangan yang sangat perlu di perbaiki. Di sisi lain, keinginan Moon Jae In untuk meningkatkan kualitas kebijakan luar negerinya tentunya tidak juga terbendung. Melihat sejak beliau kampanye sendiri telah menyuarakan bahwa *New Southern Policy* akan menjadi salah satu kebijakan dan fokus utama dari administrasi pemerintahannya.⁷³ Mengingat keuntungan dan potensi perdamaian yang mungkin dapat dicapai melalui *New Southern Policy* ini seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, tentunya Moon Jae In akan terus mengejar kemungkinan untuk melakukan kerjasama bersama ASEAN + 1 melalui kebijakan ini. Ditambah dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China yang memberikan dampak buruk ke perekonomian mereka, tentunya sangat rasional bagi Korea Selatan untuk kembali mereaktivasi negosiasi kerjasama IK-CEPA bersama Indonesia ini.

⁷¹ Ibid.

⁷² Hahm, S. D., & Heo, U. (2020). President Moon Jae-in at midterm: What affects public support for Moon Jae-in? *Journal of Asian and African Studies*, 55(8), 1128–1142. <https://doi.org/10.1177/0021909620911145>

⁷³ Mosler, H. B. (2017). President Moon Jae-in – The Right Choice for South Korea. *Asia Policy Brief*, 1–12.

Sebagai rangkuman dari bab diatas, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi rasionalitas Korea Selatan untuk kembali melanjutkan proses negosiasi kerjasama *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* atau IK-CEPA. Sebagai faktor *external changes* yang mempengaruhi rasionalitas Korea Selatan dalam pemberlanjutan negosiasi IK-CEPA dapat dianalisa melalui variabel *situational factor* yaitu terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China. Perang dagang ini menjadi sebuah ancaman nyata kepada perekonomian Korea Selatan meskipun tidak terlibat secara langsung mengingat hubungan erat Korea Selatan dengan kedua negara tersebut terutama di bidang perekonomian. Dilema – dilema yang muncul akibat dari perang dagang ini menjadikan Korea Selatan untuk mencari alternatif lain terkait aktivitas ekspornya yang menjadi patokan perekonomian utamanya.

Kemudian terkait faktor *internal changes* dari rasionalitas Korea Selatan ini dapat dianalisa melalui variabel akuntabilitas politik dimana perubahan yang terjadi berujung kepada munculnya kebijakan baru dari Korea Selatan yang dinamakan *New Southern Policy*. Kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan dari Korea Selatan yang ditujukan untuk menjaga dan membangun hubungan antara Korea Selatan dan juga negara – negara di region selatannya seperti ASEAN dan juga India. Cakupan dari kebijakan ini meliputi berbagai sektor seperti sosial budaya, keamanan nasional, perkembangan infrastruktur, dan tentunya perekonomian dari masing – masing pihak terkait. Kemudian terdapat juga faktor kepemimpinan yang muncul sebagai pengaruh dari rasionalitas Korea Selatan ini dan faktor kepemimpinan atau *leadership* role ini berkaitan erat dengan faktor

internal changes yang telah dibahas diatas dimana dengan naik nya Presiden Moon Jae In dan juga administrasi pemerintahannya di Korea Selatan, beliau juga yang menjadi pencetus dari kebijakan *New Southern Policy* ini. Sejak masa eleksi beliau sudah mengemukakan kebijakan yang berfokus untuk menjaga hubungan – hubungan bilateral dengan ASEAN + 1 ini dan juga memperkuat FTA yang terjalin dengan negara – negara tersebut sebagai bagian dari fokus utama dari administrasi beliau. Sehingga dengan 3 faktor diatas dapat mengisi tabel faktor yang dikemukakan oleh Rosenau sebagai berikut:

Gambar 3.1 Aplikasi Teori Adaptive Model of Foreign Policy

